

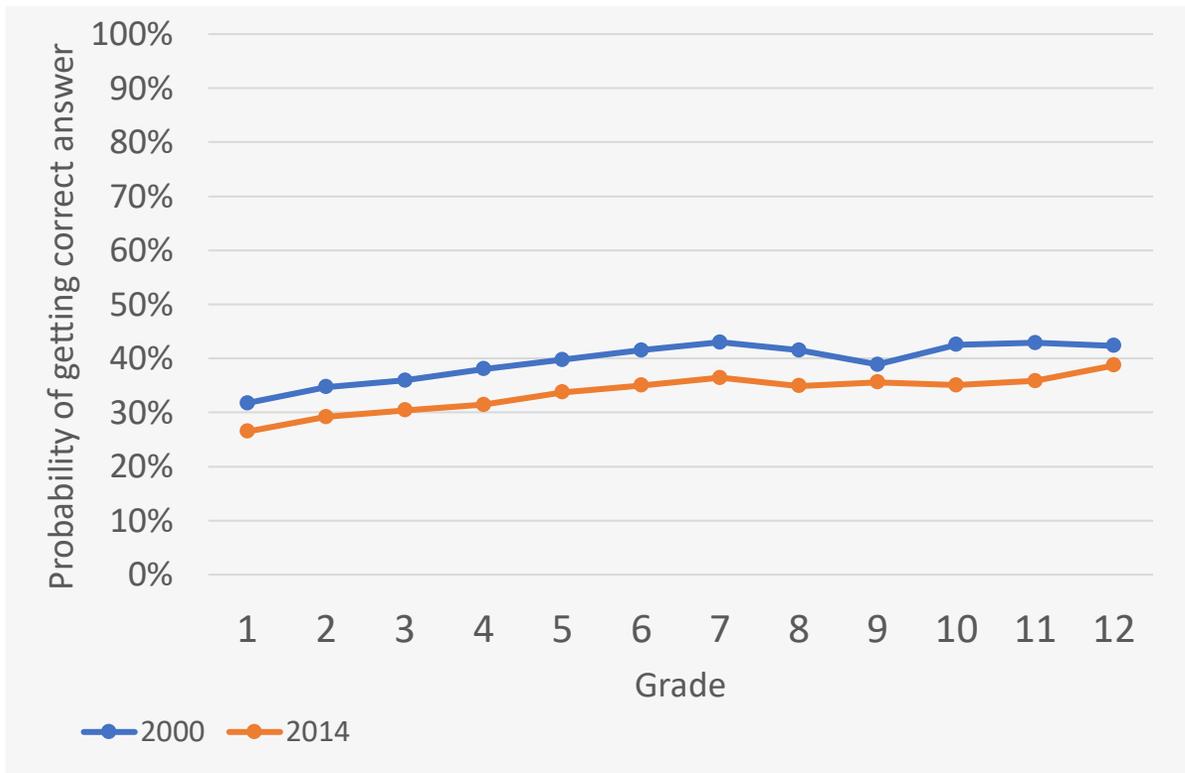


Faktor Pendorong dan Penghambat Munculnya Inovasi Kebijakan di Daerah

Risa Nihayah, Shintia Revina, Syaikhu Usman

Desentralisasi Belum Menunjukkan Hasil yang Diharapkan

- Angka Partisipasi Sekolah **meningkat**. Jumlah buta aksara **menurun**.
- **Namun, siswa bersekolah, tetapi tidak belajar.**



(Beatty et al., 2018)

- Desentralisasi memberikan kewenangan dan anggaran kepada daerah untuk mengelola layanan pendidikan
- Pada 2018, RISE melakukan survei telepon yang menunjukkan sebagian besar **daerah masih** memfokuskan kebijakan pada **peningkatan anggaran** → kurang efektif

(Zulfa, Bima, Suryadarma, 2019)

Penyusunan dan Pelaksanaan Inovasi Pendidikan di Era Desentralisasi



Wawancara mendalam



Diskusi kelompok



Observasi



Jun - Des 2019

Bukittinggi: Peningkatan Peran Kepala Sekolah dan Partisipasi Keluarga



Supervisi Silang

Tujuan Mengevaluasi kinerja guru secara obyektif



Sekolah Keluarga

Tujuan Meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendidik anak

Jaringan kekerabatan (*mamak* → *kemenakan*)

Yogyakarta: Partisipasi Aktif Orang Tua dan Masyarakat



Paguyuban Orang Tua

Tujuan Memastikan mutu pendidikan terjaga meskipun ada BOS



Jam Belajar Masyarakat (JBM)

Tujuan Menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar

Tradisi kolaborasi: *handarbeni* & *guyub rukun*

Gowa: Peningkatan Tingkat Partisipasi Sekolah



Satpol Pendidikan

- Tujuan
- Mengurangi masalah ketidakhadiran guru dan siswa
 - Menjaga keamanan sekolah



Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

- Tujuan
- Mengatasi rendahnya tingkat kelulusan UN dan putus sekolah

Inisiatif Kepala Daerah

Temuan: 3 Faktor Pendorong Inovasi Pendidikan Daerah

- **Respons pemangku kepentingan daerah** terhadap kebijakan pemerintah pusat
- Inovasi pendidikan bisa muncul dari masyarakat (***bottom-up***) atau dari inisiatif pemda/dinas pendidikan setempat (***top-down***)
- **Dukungan alokasi anggaran** untuk pengembangan dan pelaksanaan inovasi

Tantangan Implementasi Inovasi Pendidikan di Daerah

- **Rendahnya tingkat pendidikan** masyarakat
- **Budaya patuh** para pemangku kepentingan pendidikan (Bjork, 2004)
 - › Lemahnya partisipasi masyarakat
- **Dinamika politik lokal**
 - › Kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tidak populer

- Para pengambil kebijakan di daerah diharapkan lebih **memprioritaskan perbaikan mutu pendidikan**, bukan peningkatan anggaran semata.
- Pemda perlu menjalankan **inovasi pendidikan yang melibatkan peran aktif masyarakat**.
- Pemerintah Pusat perlu **memetakan daerah yang memerlukan bantuan ekstra** untuk memfokuskan kebijakan pendidikan daerah pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Terima Kasih

 +6221-3193 6336 |  rise@smeru.or.id |  riseprogramme.id

www.rise.smeru.or.id

